



## Diplomasi Perdamaian China di Timur Tengah: Kepentingan Strategis dan Stabilitas Kawasan

### *China's Peace Diplomacy in the Middle East: Strategic Interests and Regional Stability*

Canta Bayu Laksana<sup>1</sup> Peni Hanggarini<sup>2</sup>

E-mail Korespondensi : [cantabayulaksana@gmail.com](mailto:cantabayulaksana@gmail.com)

Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

---

#### Info Article

| Submitted: 8 January 2026 | Revised: 15 February 2026 | Accepted: 22 February 2026

| Published: 22 February 2026

**How to cite:** Canta Bayu Laksana, etc., "Diplomasi Perdamaian China di Timur Tengah: Kepentingan Strategis dan Stabilitas Kawasan", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 2 No. 1, 2026, p. 58-79.

---

#### ABSTRACT

*This study analyzes the transformation of China's peace diplomacy in the Middle East through the perspectives of Soft Power and Neorealism. It focuses on two major cases: China's mediation of the Saudi Arabia–Iran rapprochement in 2023 and its facilitation of the Beijing Declaration between Fatah and Hamas in 2024. The research employs a descriptive qualitative method using library research and secondary data analysis derived from academic publications and trade statistics from The Observatory of Economic Complexity (OEC) covering the period 2010–2023. The findings reveal that the significant increase in China's trade volume with the Middle East – reaching approximately US\$460 billion in 2023 – has strengthened Beijing's political leverage in the region. In inter-state conflicts such as Saudi Arabia–Iran, China's diplomacy proved effective due to its strong economic leverage and the high level of energy interdependence. Conversely, in intra-state conflicts involving non-state actors such as Fatah–Hamas, China's diplomatic engagement tended to remain normative and symbolic, given its limited coercive instruments. The study concludes that China's diplomatic activism is not driven solely by peace-oriented idealism but by rational strategic calculations aimed at securing core national interests, particularly energy security and the sustainability of the Belt and Road Initiative (BRI). Theoretically, the findings demonstrate that China applies a soft balancing strategy to counterbalance United States hegemony without engaging in direct military confrontation. Thus, China's peace diplomacy functions as a strategic instrument to promote regional stability while consolidating its position as an alternative great power in an emerging multipolar world order.*

**Keyword:** *China, Soft Power, Neorealism, Regional Stability, Middle east.*

#### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis transformasi diplomasi perdamaian China di kawasan Timur Tengah dalam perspektif Soft Power dan Neorealisme. Studi ini berfokus pada dua kasus utama, yakni mediasi rekonsiliasi Arab Saudi–Iran tahun 2023 dan fasilitasi Deklarasi Beijing antara Fatah–Hamas tahun 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur serta analisis data sekunder dari publikasi akademik dan statistik perdagangan The Observatory of Economic Complexity (OEC) periode 2010–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan signifikan volume perdagangan China dengan Timur Tengah—mencapai sekitar US\$460 miliar pada 2023—telah memperkuat daya tawar politik Beijing di kawasan. Dalam konflik antarnegara (inter-state) seperti Arab Saudi–Iran, diplomasi China terbukti efektif karena didukung leverage ekonomi dan ketergantungan energi yang tinggi. Sebaliknya, dalam konflik intra-negara yang melibatkan aktor non-negara seperti Fatah–Hamas, efektivitas diplomasi cenderung bersifat normatif dan simbolik akibat keterbatasan instrumen penekan yang mengikat. Temuan ini menegaskan bahwa aktivisme diplomatik China bukan semata-mata didorong oleh idealisme perdamaian, melainkan oleh kalkulasi rasional untuk mengamankan kepentingan strategis, khususnya keamanan energi dan keberlanjutan Belt and Road Initiative (BRI). Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa China menerapkan strategi soft balancing untuk menyeimbangkan hegemoni Amerika Serikat tanpa konfrontasi militer langsung. Dengan demikian,

diplomasi perdamaian China menjadi instrumen penting dalam membentuk stabilitas kawasan sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar alternatif dalam tatanan dunia multipolar.

**Kata Kunci:** *China, Soft Power, Stabilitas Kawasan, Neorealisme, Timur Tengah*

## **Pendahuluan**

Transformasi peran China di Timur Tengah telah mencapai titik balik yang signifikan, bergeser dari aktor ekonomi yang berhati-hati menjadi mediator keamanan yang diperhitungkan. Secara historis, keterlibatan China dilakukan dengan prinsip non-intervensi, menghindari campur tangan militer langsung kecuali jika mengancam keamanan nasional atau kepentingan ekonomi strategis (Laarid, 2022). Namun, menyadari dampak instabilitas kawasan terhadap pasar energi global, Beijing secara strategis mereposisi dirinya. Perubahan ini termanifestasi secara nyata pada Maret 2023, ketika Beijing menjadi tuan rumah pembicaraan intensif yang menghasilkan pernyataan trilateral bersejarah antara Arab Saudi dan Iran. Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara setuju memulihkan hubungan diplomatik dan mengaktifkan kembali perjanjian keamanan tahun 2001 (Fulton, 2023). Pemerintah China menegaskan langkah ini sebagai dukungan terhadap kemandirian strategis negara-negara Timur Tengah untuk menyingkirkan campur tangan eksternal (MFA China, 2023). Keberhasilan ini menegaskan efektivitas soft power China sebagai "mediator netral", sebuah posisi yang sulit dijalankan oleh Amerika Serikat (AS) akibat ketiadaan hubungan diplomatik dengan Iran. Selain itu, momentum ini menandai era baru diplomasi Beijing yang lebih asertif di kawasan tersebut.

Dinamika ini semakin kompleks ketika China memperluas momentum diplomasinya ke dalam ranah konflik non-negara, sebuah area yang sebelumnya jarang disentuh oleh aktor luar selain Barat. Pada Juli 2024, China memfasilitasi "Deklarasi Beijing" antara faksi Fatah dan Hamas untuk mengakhiri perpecahan politik Palestina, sebuah langkah yang merefleksikan kalkulasi strategis China untuk mengisi kekosongan kekuasaan (*power vacuum*) akibat pengalihan prioritas AS ke Asia-Pasifik (Torres 2023: 3-4; Sameer 2023). Keterlibatan ini bukan semata manuver diplomatik, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengamankan kepentingan ekonomi, khususnya energi dan rute *Belt and Road Initiative* (BRI). Mengingat ketergantungan China pada energi impor adalah kelemahan utama, stabilitas Timur Tengah menjadi elemen vital untuk mencegah AS memutus akses rute perdagangan internasional jika konflik pecah (Fulton et.al, 2019; Grant dan Kieff, 2021). Oleh karena itu, China menerapkan strategi lindung nilai (*hedging*) dan penyeimbangan (*balancing*). Melalui *Silk Road Economic Belt* di darat dan *Maritime Silk Road Initiative* di laut, China membangun konektivitas dengan Iran dan negara-negara Teluk guna menciptakan sistem ekonomi di luar kendali AS (Fulton, 2021). Dengan memosisikan diri sebagai alternatif dari mediasi tradisional Barat, China menantang tatanan mapan dan menegaskan visinya dalam tata kelola global,

sekaligus memperkuat daya tawar politiknya di hadapan kekuatan besar lainnya (Arab Center for Research and Policy Studies, 2023; Torres, 2023).

Berdasarkan dinamika tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi perdamaian China di Timur Tengah melalui dua studi kasus utama: peran mediasi Beijing dalam pemulihan hubungan Arab Saudi-Iran dan rekonsiliasi faksi Fatah-Hamas. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah analisis mengenai bagaimana China mengonversi kekuatan ekonominya menjadi pengaruh diplomatik di wilayah konflik yang sensitif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kepentingan strategis yang mendorong keterlibatan aktif China, mulai dari keamanan energi hingga motif persaingan kekuatan global (*great power competition*). Lebih lanjut, penelitian ini akan mengevaluasi kontribusi China terhadap stabilitas kawasan, serta bagaimana peran mediator tersebut memperkuat legitimasi politik dan ekonomi China di mata negara-negara Timur Tengah di tengah persaingan pengaruh dengan Amerika Serikat.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*library research*) dan analisis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena politik global secara mendalam melalui interpretasi komprehensif terhadap data dan literatur yang relevan (Creswell, 2016). Metode studi kepustakaan digunakan untuk menggali data dari berbagai dokumen tertulis, mulai dari buku, jurnal ilmiah, hingga arsip digital yang berkaitan langsung dengan transformasi peran China dari mitra ekonomi menjadi mediator keamanan (Zed, 2014).

Basis data penelitian ini bersumber dari referensi ilmiah kredibel yang mencakup jurnal internasional mengenai dinamika Timur Tengah serta laporan resmi terkait mediasi konflik Arab Saudi-Iran dan rekonsiliasi Fatah-Hamas. Untuk memperkuat analisis empiris, data statistik perdagangan spesifik diperoleh dari *The Observatory of Economic Complexity* (OEC World) dengan rentang waktu **2010 hingga 2023**. Periode ini dipilih untuk memetakan tren volume ekspor-impor China dan AS sebelum dan sesudah peluncuran inisiatif strategis seperti *Belt and Road Initiative* (BRI). Seluruh data dipilih berdasarkan relevansinya dengan kerangka konseptual *Soft Power* (Nye, 2004) untuk menganalisis daya tarik diplomasi China, serta teori Neorealisme (Waltz, 1979) untuk membedah struktur anarki dan upaya penyeimbangan kekuatan (*balance of power*) di kawasan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Proses ini dilakukan dengan membandingkan data statistik ekonomi dari OEC World dengan dokumen kebijakan resmi dan analisis akademik terdahulu guna memverifikasi konsistensi temuan mengenai dominasi ekonomi China. Teknik analisis data selanjutnya dilakukan menggunakan analisis isi (*content*

*analysis*) untuk menarik inferensi valid dari teks dan konteks penggunaannya (Krippendorff, 2004). Analisis ini dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis:

1. Reduksi Data: Memilah informasi kunci mengenai taktik mediasi diplomatik China dan menyaring data perdagangan dari OEC World (2010–2023) yang relevan dengan ketergantungan energi dan investasi infrastruktur.
2. Penyajian Data: Mengelompokkan temuan berdasarkan pola volume perdagangan, strategi penyeimbang (*balancing*) terhadap hegemoni AS, serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel penunjang.
3. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana China mengonversi kekuatan ekonominya menjadi pengaruh politik strategis dan legitimasi mediator di Timur Tengah.

## Hasil dan pembahasan

### 1.1 Keterlibatan China dalam Perdamaian di Timur Tengah

Sebelum momentum rekonsiliasi Arab Saudi-Iran pada tahun 2023 keterlibatan China dalam perdamaian di Timur Tengah ditandai dengan pendekatan yang berhati-hati, bertahap, dan sangat berbeda dari hegemoni keamanan Barat. Sun Degang (2018), mendefinisikan strategi China pada periode ini sebagai "Diplomasi Mediasi Semu" (*Quasi-Mediation Diplomacy*). China bertindak sebagai fasilitator yang partisipatif namun menolak untuk memaksakan solusi politik atau memberikan jaminan keamanan militer. Berbeda dengan pendekatan *Liberal Peace* Barat yang menekankan demokratisasi sebagai prasyarat damai, China menawarkan konsep "*Developmental Peace*". Sebagaimana dijelaskan oleh Xue Li (2019), doktrin ini berargumen bahwa akar instabilitas di Timur Tengah bukanlah ideologi atau agama, melainkan stagnasi ekonomi. Oleh karena itu, kontribusi perdamaian China pada era ini lebih banyak diwujudkan melalui kemitraan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di bawah BRI sebagai fondasi stabilitas jangka panjang.

Meskipun sering dianggap sebagai aktor ekonomi semata, China sebenarnya telah memainkan peran diplomatik yang substansial dalam isu-isu keamanan tingkat tinggi jauh sebelum menjadi mediator perdamaian Arab Saudi-Iran tahun 2023, terutama dalam Kesepakatan Nuklir Iran *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) 2015. Keterlibatan China dalam negosiasi P5+1 melampaui peran simbolis; China mengambil tanggung jawab teknis yang kritis, yakni memimpin desain ulang reaktor air berat Arak untuk memastikan Iran tidak dapat memproduksi plutonium level senjata. Langkah ini menempatkan China sebagai penyeimbang yang efektif antara AS dan Iran. Hal ini ditegaskan Burton (2019) sebagai bukti

kesiapan China untuk terlibat dalam manajemen konflik global tanpa meninggalkan prinsip non-intervensinya.

Dalam konteks konflik yang berkepanjangan seperti Perang Saudara Suriah, China menerapkan strategi "keterlibatan ganda". Di satu sisi, China bersama Rusia menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB sebanyak enam kali hingga 2017 untuk memblokir resolusi yang dianggap melegitimasi intervensi militer asing atau perubahan rezim paksa. Menurut Michael D. Swaine (2012), tindakan ini bukan semata-mata dukungan buta terhadap Bashar al-Assad, melainkan upaya menegakkan norma kedaulatan negara dan mencegah terulangnya skenario Libya. Di sisi lain, China secara aktif mengundang perwakilan pemerintah Suriah dan delegasi oposisi ke Beijing secara terpisah untuk mendorong solusi politik, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan besar yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai.

Pola serupa juga diterapkan dalam Konflik Israel-Palestina, di mana China berusaha menaikkan profil diplomatiknya melalui institusionalisasi mediasi. Sejak tahun 2002, China telah menunjuk Utusan Khusus untuk Timur Tengah, dan pada tahun 2013, Presiden Xi Jinping mengajukan "Empat Poin Proposal" untuk penyelesaian konflik. Meskipun inisiatif ini sering dikritik bersifat retorik karena kurangnya tekanan koersif terhadap Israel, langkah-langkah tersebut penting dalam membangun citra China sebagai kekuatan netral yang "bersahabat dengan semua pihak" (Sun dan Zoubir, 2018). Akumulasi dari berbagai kebijakan luar negeri China inilah yang secara perlahan membangun modal kepercayaan politik di kawasan Timur Tengah sehingga menjadi landasan bagi keberhasilan diplomasi China pada mediasi Arab Saudi-Iran tahun 2023 dan Mediasi Fatah-Hamas tahun 2024 (Fulton, 2023).

## **1.2 Intervensi China dalam Perdamaian Arab Saudi dan Iran**

Ketegangan antara Arab Saudi dan Iran merupakan salah satu konflik regional paling rumit dan berlarut-larut di Timur Tengah, yang dipicu oleh akumulasi faktor perbedaan teologis, politik, serta persaingan hegemoni regional. Kompleksitas ini telah mendorong berbagai aktor internasional, termasuk Indonesia, untuk berupaya memediasi kedua negara. Keterlibatan Indonesia didasari oleh kedekatan emosional dan kesamaan identitas keagamaan dengan negara-negara di kawasan tersebut (Karimah, 2017). Namun, berbagai inisiatif perdamaian yang telah ditempuh melalui pendekatan politik maupun sentimen keagamaan oleh pihak-pihak terdahulu belum membuahkan hasil yang signifikan.

Namun, dinamika berubah drastis pada 10 Maret 2023 ketika Arab Saudi dan Iran menyepakati pemulihan hubungan diplomatik di Beijing, mengakhiri kebuntuan selama tujuh tahun akibat perang Yaman. Kesepakatan yang difasilitasi oleh diplomat senior China, Wang Yi, ini mengejutkan komunitas internasional

karena proses diplomasinya dilakukan secara senyap (*silent diplomacy*). Pemerintah China mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut adalah hasil dari negosiasi intensif yang berlangsung sejak 6 hingga 10 Maret, melibatkan delegasi Iran di bawah pimpinan Ali Shamkhani dan delegasi Arab Saudi yang dipimpin oleh Musaed Bin Mohammed Alaiban (Kompas, 2023).

Capaian diplomatik China ini bukanlah peristiwa instan, melainkan kulminasi dari strategi jangka panjang berbasis *soft power*. Sejak Kongres Nasional Partai Komunis tahun 2007, Beijing telah menetapkan *soft power* sebagai instrumen vital kebijakan luar negerinya untuk mengamankan kepentingan nasional (Yulianti dan Affandi, 2018). China menyadari perlunya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan pembentukan citra global yang positif. Oleh karena itu, pendekatan ini dirancang untuk meyakinkan dunia bahwa kebangkitan China bersifat damai dan tidak mengancam kedaulatan negara lain.

Kepentingan mendasar China dalam memediasi hubungan Arab Saudi dan Iran berakar kuat pada kebutuhan keamanan energi dan stabilitas ekonomi untuk menopang industri domestiknya. Sebagai konsumen energi terbesar kedua di dunia, China sangat bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah. Arab Saudi menjadi mitra krusial, meskipun kebijakan pemotongan produksi OPEC sempat menurunkan volume eksportnya, memaksa China mendiversifikasi pasokan ke Rusia dan negara lain (Elass, 2021). Di sisi lain, Iran memegang peran strategis melalui kesepakatan investasi jangka panjang senilai \$400 miliar, di mana China menjamin investasi infrastruktur dan energi selama 25 tahun dengan imbalan pasokan minyak yang stabil (Fassihi dan Myers, 2021). Oleh karena itu, mendamaikan kedua kekuatan ini adalah langkah pragmatis untuk mengamankan rantai pasok energi China dari risiko konflik regional.

Selain faktor energi, China memanfaatkan momentum penurunan pengaruh AS di kawasan untuk memperluas pengaruh geopolitiknya melalui pendekatan "non-intervensi". Data perdagangan menunjukkan pergeseran drastis di mana nilai perdagangan China dengan Timur Tengah melonjak signifikan, sementara perdagangan AS mengalami stagnasi atau penurunan dalam satu dekade terakhir (OEC World). Negara-negara Timur Tengah merespons positif kehadiran China karena Beijing tidak mencampuri urusan politik domestik mereka, berbeda dengan AS yang kerap dipandang memiliki ambisi imperialis melalui intervensi militer dan agenda demokratisasi (Yulianti & Affandi, 2018). Hal ini memberikan China legitimasi moral dan kepercayaan politik yang lebih tinggi dibandingkan Barat di mata negara-negara kawasan.

Terakhir, mediasi ini berfungsi untuk mengamankan konektivitas proyek BRI dan memperkuat peran China sebagai penyedia bantuan pembangunan. Melalui forum kerja sama seperti *China-Arab States Cooperation Forum (CASCF)*, China telah berkomitmen memberikan pinjaman sebesar 20 miliar dolar AS untuk

infrastruktur dan bantuan rekonstruksi bagi negara-negara terdampak konflik di kawasan (Zhou, 2018). Stabilitas hubungan antara Arab Saudi dan Iran menjadi prasyarat mutlak bagi kelancaran proyek-proyek strategis ini. Keberhasilan China mempertemukan pejabat tinggi keamanan kedua negara tidak hanya melindungi investasi ekonominya, tetapi juga menegaskan status diplomatiknya sebagai kekuatan besar yang mampu menghadirkan stabilitas tanpa menggunakan kekuatan koersif.

### 1.3 Kepentingan China dalam Rekonsiliasi Fatah - Hamas

Perpecahan internal Palestina antara Fatah dan Hamas telah menjadi hambatan struktural dalam upaya pembentukan negara Palestina berdaulat sejak pecahnya konflik terbuka pasca-pemilu legislatif 2006 yang berujung pada pengambilalihan jalur Gaza oleh Hamas pada 2007 (Milton-Edwards, 2008). Dualitas kepemimpinan ini menciptakan fragmentasi politik yang akut: Fatah mendominasi Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat dengan pendekatan sekuler-diplomatis, sementara Hamas menguasai Gaza dengan pendekatan perlawanan bersenjata. Selama hampir dua dekade, berbagai upaya rekonsiliasi telah diinisiasi oleh aktor-aktor regional, mulai dari Perjanjian Mekkah (2007) yang dimediasi Arab Saudi, Perjanjian Kairo (2011 dan 2017) oleh Mesir, hingga Deklarasi Aljir (2022) oleh Aljazair (Elgindy, 2022). Namun, inisiatif-inisiatif tersebut kerap kandas pada tahap implementasi akibat ketiadaan mekanisme penjamin (*guarantor*) yang kuat serta tekanan eksternal dari Barat yang melabeli Hamas sebagai entitas teroris, sehingga membatasi ruang gerak Fatah untuk membentuk pemerintahan persatuan yang inklusif (Gunning, 2007; Brenner, 2017).

Berbeda dengan pendekatan aktor Arab sebelumnya yang sering kali terjebak dalam dinamika persaingan regional atau hegemoni AS, intervensi China melalui Deklarasi Beijing 2024 menawarkan paradigma baru. China hadir sebagai kekuatan besar non-Barat yang menawarkan pendekatan "diplomasi inklusif" dengan mengintegrasikan seluruh faksi ke dalam kerangka legitimasi PLO tanpa prasyarat pelucutan senjata di awal, sebuah langkah pragmatis yang membedakannya dari pola mediasi tradisional (Sun dan Zoubir, 2018; Fulton, 2024).

Keterlibatan China dalam memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina melalui Deklarasi Beijing pada Juli 2024 menandai evolusi signifikan dalam kebijakan luar negerinya, bergeser dari prinsip non-intervensi pasif menuju aktivisme diplomatik konstruktif di bawah payung *Global Security Initiative* (GSI). Memanfaatkan momentum keberhasilan mediasi Arab Saudi-Iran setahun sebelumnya, China memosisikan diri sebagai mediator alternatif yang netral di tengah krisis legitimasi aktor Barat pasca-eskalasi konflik Oktober 2023 (Fulton, 2024). Proses diplomasi ini memuncak pada pertemuan 14 faksi Palestina, termasuk

rival utama Fatah dan Hamas, yang menyepakati pembentukan "Pemerintah Rekonsiliasi Nasional Sementara" untuk mengelola Gaza pasca-konflik.

Dalam kerangka ini, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengartikulasikan "peta jalan tiga tahap" (*three-step roadmap*) yang mencakup gencatan senjata komprehensif, tata kelola pasca-perang bersama, dan advokasi keanggotaan penuh Palestina di PBB; sebuah pendekatan yang dinilai lebih terstruktur dibandingkan retorika solidaritas normatif China di masa lalu (Lons, 2024; Chaziza, 2024). Secara geopolitik, inisiatif ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen *soft power* China untuk menantang hegemoni mediasi AS dan memvalidasi posisinya sebagai pelindung kepentingan *Global South* (Murphy, 2022).

#### **1.4 Pengaruh *Soft Power* dan Diplomasi Ekonomi China di Timur Tengah**

Hubungan antara China dan negara-negara di kawasan Timur Tengah memiliki keterkaitan erat dengan inisiatif ambisius proyek BRI yang diluncurkan oleh China pada tahun 2013. Proyek BRI merupakan program besar yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan arus perdagangan di kawasan Asia dan wilayah sekitarnya, meniru konsep jalur sutra kuno. Di samping itu, pendekatan China terhadap Timur Tengah juga didorong oleh upayanya memperkuat posisi strategis dalam hal keamanan energi. Kebutuhan akan pasokan energi terutama minyak dan gas merupakan bagian vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional negara tersebut (Meidan, 2015). BRI tidak hanya mendorong kerja sama perdagangan dan konektivitas global, namun juga berupaya membangun sistem ekonomi yang berada di luar pengaruh dominan AS (Lons et al., 2019).

China memanfaatkan kekuatan ekonominya sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang selaras dengan pendekatan *soft power*. Peningkatan intensitas kerja sama ekonomi China di kawasan Timur Tengah ditujukan untuk membuka pasar baru, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dan jaminan keamanan energi (Guzansky dan Lavi, 2020). Ketergantungan terhadap energi, terutama minyak, telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi China yang pesat. Arab Saudi, sebagai salah satu negara produsen minyak terbesar, secara konsisten menjadi mitra utama penyedia minyak bagi China, bersaing dengan Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai kekuatan minyak global, peran Arab Saudi tidak mengejutkan, mengingat cadangan minyaknya yang mencapai 267 miliar barel atau sekitar 16 persen dari total cadangan minyak dunia, menjadikannya sebagai pemilik cadangan minyak terbesar kedua secara global (Fulton, 2020).

Negara-negara Timur Tengah memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi China, khususnya minyak bumi. Pada tahun 2000, konsumsi minyak harian China tercatat sebesar 4,8 juta barel, dan meningkat

signifikan menjadi sekitar 14,5 juta barel per hari pada tahun 2019. Seiring dengan itu, China juga menunjukkan ketertarikan dalam diversifikasi sumber energi dengan meningkatkan impor gas alam. Pada tahun 2013, lebih dari separuh kebutuhan minyak China diimpor dari kawasan Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia dan Arab Saudi menjadi pemasok utama minyak bagi China. Dari sudut pandang energi, kawasan Timur Tengah memiliki posisi yang semakin strategis dalam kalkulasi kebijakan luar negeri Beijing. Selain minyak dan gas, kawasan ini juga menjadi sumber penting bagi bahan baku kimia yang mendukung sektor manufaktur China dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya (Houghton, 2022).

China merupakan salah satu negara pengimpor utama minyak bumi dan gas alam dari kawasan Timur Tengah. Ketergantungan China terhadap sumber energi dari wilayah ini diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi domestik untuk mendukung ekspansi sektor industri nasional. Selama ini, China menerapkan strategi yang cermat dan seimbang dalam mengelola impor energi dari Timur Tengah. Namun, hubungan erat antara Arab Saudi dan AS menimbulkan kekhawatiran bagi China, mengingat potensi intervensi AS dalam memengaruhi kebijakan ekspor energi Arab Saudi terhadap China. Dalam konteks ini, Iran menjadi mitra strategis yang signifikan, karena dinilai lebih tahan terhadap tekanan geopolitik dari AS.

Oleh karena itu, kepentingan ekonomi China terhadap Arab Saudi dan Iran sangat besar, terutama dalam hal akses terhadap cadangan energi seperti minyak dan gas alam yang melimpah di kawasan tersebut. Sumber daya ini juga berperan penting dalam mendukung implementasi inisiatif BRI yang bertujuan memperkuat integrasi dan konektivitas perdagangan di Asia dan sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa China memandang Arab Saudi dan Iran sebagai aktor kunci dalam strategi energi dan ekonomi jangka panjangnya. Atas dasar kepentingan ini, China mengambil sikap proaktif dalam mendorong pemulihan hubungan diplomatik antara kedua negara, guna menjaga stabilitas kawasan serta memperkuat peran strategisnya di Timur Tengah.

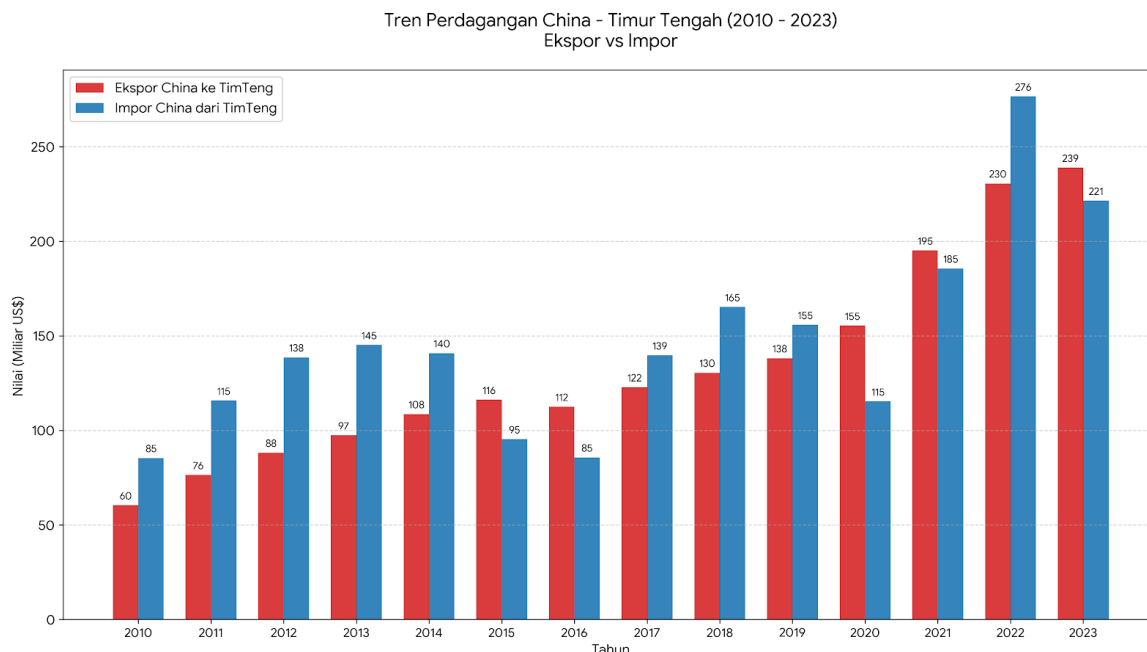
China juga turut berperan aktif dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara di Timur Tengah yang tengah dilanda konflik. Sebagai contoh, China mengirim sekitar 2.000 tenaga medis ke Yaman guna membantu membenahi layanan kesehatan masyarakat di sana. Selain itu, China menyalurkan bantuan dana sebesar \$7,62 juta untuk Palestina dan \$34,5 juta untuk mendukung Suriah, Yordania, Lebanon, Libya, serta Yaman. Bantuan-bantuan ini memperkuat citra China sebagai negara yang tidak memiliki ambisi untuk menguasai kawasan Timur Tengah (Al Tamimi, 2017). Di samping itu, China memainkan peran sebagai pihak netral dan penyeimbang dalam berbagai konflik regional, meskipun tetap

menjadikan kepentingan ekonomi dan perdagangan sebagai orientasi utamanya. Misalnya, dalam perselisihan antara Qatar dan negara-negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, serta Mesir, China memberikan dukungan kepada Qatar untuk mengatasi tekanan ekonomi yang ditimbulkan akibat konflik tersebut

China terakhir kali memainkan peran sebagai mediator dalam konflik antara Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2017. Dalam upayanya meredakan ketegangan, China mempertemukan kedua pihak dalam forum *China-Arab States Cooperation Forum* (CASCF) yang diselenggarakan di Beijing. Pada saat yang bersamaan, China juga menjadi pendukung utama bagi Qatar dalam menghadapi embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan negara-negara sekutunya. Dampak dari embargo tersebut terlihat dalam peningkatan signifikan hubungan dagang: ekspor China ke Qatar naik sebesar 36%, sementara ekspor Qatar ke China melonjak hingga 60%. Kini, China telah mengambil alih posisi AS sebagai mitra utama impor bagi Qatar (Chowdhury, 2018). Secara historis, hubungan antara China dan negara-negara di Timur Tengah relatif bebas dari konflik serius sejak berakhirnya Perang Dunia II, berbeda dengan AS yang memiliki rekam jejak hubungan bermasalah dengan sejumlah negara di kawasan tersebut.

Keberhasilan diplomasi dan peran netral China dalam konflik-konflik tersebut secara langsung memicu pergeseran distribusi kekuatan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Strategi diplomasi yang memprioritaskan kerja sama ekonomi pragmatis tanpa intervensi politik internal ini telah membangun kepercayaan regional, membuka jalan bagi China untuk mengisi kekosongan pengaruh ekonomi yang ditinggalkan oleh kekuatan Barat (Zreik, 2024). Implikasinya, terjadi intensifikasi volume perdagangan bilateral yang signifikan, di mana negara-negara Timur Tengah semakin bergantung pada China baik sebagai pasar utama ekspor energi maupun sumber impor barang manufaktur dan teknologi. Akumulasi dari penguatan hubungan diplomatik dan ekonomi ini tercermin secara nyata dalam data statistik agregat berikut, yang menunjukkan tren pertumbuhan nilai ekspor dan impor yang fluktuatif namun cenderung meningkat tajam dalam satu dekade terakhir.

Gambar 1.1 Tren Perdagangan China – Timur Tengah (2010 -2023)



Sumber : *Observatory of Economic Complexity* 2010 -2023 dan olahan penulis

Gambar 1.1 menunjukkan data perdagangan bilateral periode 2010 hingga 2023 terjadi pergeseran fundamental dalam distribusi kekuatan ekonomi antara China dan Timur Tengah, yang bergerak dari pola ketergantungan asimetris menuju interdependensi yang kompleks dan strategis. Pada fase awal (2010–2014), defisit neraca perdagangan yang signifikan di pihak China menandakan posisi tawar yang relatif lemah, di mana China sangat bergantung pada keamanan suplai energi dari kawasan tersebut tanpa memiliki instrumen penyeimbang yang memadai. Namun, lonjakan ekspor China yang drastis pasca-2020 hingga mencetak surplus pada tahun 2023 mengindikasikan keberhasilan Beijing dalam merestrukturisasi hubungan tersebut. Sebagaimana dianalisis oleh Jonathan Fulton (2019), perubahan ini mencerminkan mekanisme *strategic hedging*, di mana negara-negara Teluk kini menjadikan China bukan sekadar pasar ekspor minyak, melainkan mitra krusial bagi kelangsungan visi diversifikasi ekonomi domestik mereka melalui skema *BRI*.

Peningkatan daya tawar China tidak hanya bersumber dari volume perdagangan, tetapi juga dari jenis komoditas yang diperdagangkan, yang menciptakan apa yang disebut dalam ekonomi politik internasional sebagai "kekuatan struktural". Transisi ekspor China dari barang manufaktur murah ke teknologi tinggi dan infrastruktur digital telah memperdalam keterikatan kawasan

tersebut pada ekosistem teknologi China. Ehteshami dan Horesh (2018) menggambarkan fenomena ini sebagai "Asianization of the Middle East", di mana integrasi infrastruktur digital dan fisik menciptakan biaya peralihan (*switching cost*) yang tinggi bagi negara mitra, sehingga secara efektif mengikat mereka dalam orbit pengaruh ekonomi China jangka panjang. Dalam konteks ini, ketergantungan teknologi memberikan China *leverage* politik yang lebih tahan lama dibandingkan sekadar bantuan finansial tradisional.

Tabel 1.1 Data Ekspor China dari Kawasan Timur Tengah Tahun 2023

Komoditas	Nilai(US\$ Miliar)	Presentase dari Total Impor	Negara Utama
Teknologi dan Otomotif (EV)	147,02	61,7%	UAE, Arab Saudi, Israel
Input Industri dan Manufaktur	56,54	23,8%	Mesir
Rekontruksi dan Kebutuhan Dasar	34,5	14,5%	Irak, Iran, Suriah
Total	238,06	100%	

Sumber : *Observatory of Economic Complexity* 2023 dan olahan penulis

Data pada Tabel 1.1 ekspor China ke Timur Tengah tahun 2023 menunjukkan transformasi fundamental dalam rantai nilai ekonomi China. Tidak lagi sekadar mengekspor barang konsumsi murah, mayoritas ekspor China (61,7% atau senilai US\$ 147 miliar) kini terkonsentrasi pada kluster Teknologi Tinggi dan Otomotif, dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Israel sebagai pasar utama. Fenomena paling mencolok adalah lonjakan ekspor kendaraan listrik (*Electric Vehicles*) dan elektronik canggih ke pasar Teluk dan Israel, yang menggantikan dominasi produk Barat. Di sisi lain, peran China sebagai penopang industrialisasi kawasan terlihat jelas pada ekspor ke Mesir (23,8%), di mana China menyuplai mesin dan bahan baku industri. Sementara itu, peran 'Developmental Peace' China tercermin pada kluster negara pasca-konflik seperti Irak dan Iran (14,5%), di mana ekspor didominasi oleh material rekonstruksi dan kebutuhan pokok yang vital bagi stabilitas sosial. Data ini menegaskan bahwa China telah berhasil mendiversifikasi portofolio ekspornya untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap sub-kawasan: teknologi untuk negara kaya, mesin untuk negara industri, dan infrastruktur untuk negara berkembang.

Lebih jauh, meskipun China masih mengimpor minyak dalam jumlah masif (terlihat dari tingginya nilai impor pada 2022), posisi ini telah berevolusi menjadi instrumen diplomatik yang ampuh. Mengacu pada kerangka pemikiran John

Calabrese (2019), status China sebagai pembeli monopsoni terbesar bagi minyak Timur Tengah menciptakan dinamika "interdependensi senjata" (*weaponized interdependence*). Ketergantungan pendapatan fiskal negara-negara produsen energi (seperti Arab Saudi, Irak, dan Oman) terhadap pasar China memberikan Beijing daya tawar politik yang signifikan untuk memastikan keberpihakan—atau setidaknya netralitas elit Timur Tengah dalam isu-isu inti kepentingan China. Dengan demikian, data 2023 menegaskan bahwa China telah berhasil menyeimbangkan "kerentanan energi"-nya dengan "kekuatan pasar" dan "dominasi infrastruktur", menjadikannya aktor yang tak tergantikan dalam arsitektur ekonomi-politik Timur Tengah.

Tabel 1.2 Data Impor China dari Kawasan Timur Tengah Tahun 2023

Komoditas	Nilai(US\$ Miliar)	Presentase dari Total Impor	Negara Utama
Minyak Mentah	149,78	67,6%	Arab Saudi, Irak, Kuwait, Oman, Iran
Campuran dan Minyak Olah	41,97	18,9%	UAE, Bahrain
Gas Alam (LNG)	21,00	9,5%	Qatar
Non - Energi	8,83	4%	Israel, Mesir, Yordania
Total	221,58	100%	

Sumber : *Observatory of Economic Complexity* 2023 dan olahan penulis

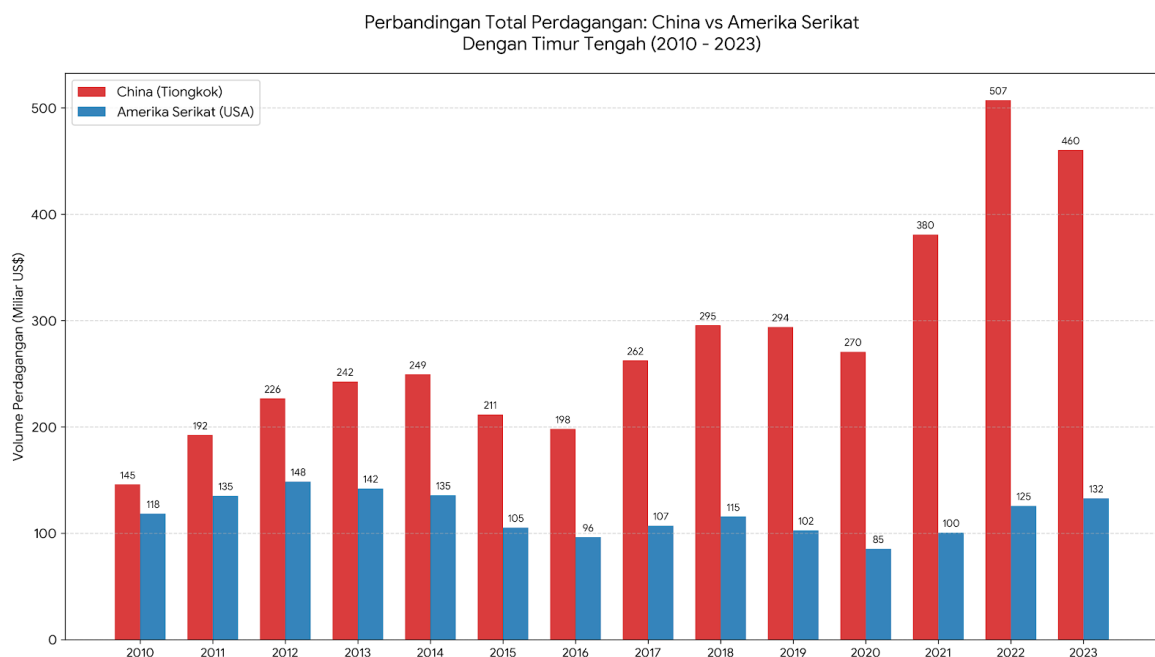
Data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa struktur impor China dari Timur Tengah memiliki tingkat konsentrasi energi yang ekstrem. Sebanyak 96,01% dari total nilai impor China dari kawasan ini (senilai US\$ 212,75 miliar) berasal dari sektor energi. Minyak Mentah memegang porsi terbesar yakni 67,6%, yang disuplai terutama oleh Arab Saudi, Irak, dan Kuwait. Sementara itu, Gas Alam Cair (LNG) berkontribusi sekitar 9,5%, dengan Qatar sebagai pemasok tunggal terbesar untuk komoditas ini. Sisa porsi energi sebesar 18,9% berasal dari Uni Emirat Arab yang berperan sebagai hub transit minyak dan produk olahan. Data ini menegaskan bahwa diversifikasi perdagangan di sisi impor masih sangat minim; Timur Tengah secara fundamental berfungsi sebagai penopang keamanan energi China, sementara komoditas non-energi hanya menyumbang angka minoritas sebesar 4%.

### 1.5 Kekuatan Ekonomi China vs AS di Timur Tengah

Dalam dua dekade terakhir, arsitektur ekonomi-politik di Timur Tengah telah mengalami pergeseran tektonik yang menandai berakhirnya momen unipolar AS di sektor perdagangan. Fenomena ini didorong oleh perubahan struktural dalam pasar energi global; sebagaimana dianalisis oleh Yetiv (2017), keberhasilan 'Revolusi Energi' di AS melalui produksi *shale oil* telah menciptakan kemandirian energi, yang secara drastis mengurangi imperatif strategis Washington untuk mengimpor hidrokarbon dari Teluk. Akibatnya, terjadi apa yang disebut sebagai *economic retrenchment* atau penarikan diri secara bertahap dari keterlibatan ekonomi langsung yang masif, meninggalkan vakum pasar yang segera diisi oleh China. Berbeda dengan AS, China justru memperdalam ketergantungannya melalui BRI untuk mengamankan pasokan energi bagi industrialisasi domestiknya (Ehteshami & Horesh, 2018).

Divergensi kepentingan ini menciptakan kesenjangan (*gap*) volume perdagangan yang semakin ekstrem antara kedua kekuatan besar tersebut. Negara-negara Timur Tengah merespons pergeseran ini dengan strategi *hedging*; mereka tetap mempertahankan AS sebagai penjamin keamanan, namun secara agresif beralih ke China sebagai penopang utama ekonomi nasional (Fulton, 2019). Disparitas pengaruh ekonomi ini tervisualisasi secara nyata dalam data perdagangan bilateral satu dekade terakhir, di mana kurva pertumbuhan China melesat meninggalkan stagnasi AS, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 Tren Perbandingan Volume Perdagangan China vs AS dengan Timur Tengah (2010 -2023)



Sumber : *Observatory of Economic Complexity* 2010 -2023 dan olahan penulis

Data volume perdagangan bilateral periode 2010 hingga 2023 pada Gambar 1.2 mengungkapkan terjadinya pergeseran struktural yang fundamental dalam tatanan ekonomi politik di Timur Tengah, yang ditandai dengan fenomena *The Great Divergence* antara China dan AS. Secara deskriptif, titik balik strategis ini teridentifikasi secara jelas pada kurun waktu 2014–2015. Sebelumnya, kesenjangan volume perdagangan kedua negara besar ini masih relatif moderat; namun, pasca-2014, lintasan pertumbuhan keduanya bergerak ke arah yang berlawanan. Volume perdagangan AS mengalami stagnasi dan penurunan tren dari ~\$135 miliar pada 2014 menjadi ~\$105 miliar pada 2015—sementara China terus mencatatkan pertumbuhan yang konsisten. Mengacu pada analisis Steve A. Yetiv (2017) dalam karyanya mengenai "Revolusi Energi", fenomena ini bukanlah kebetulan siklusal, melainkan dampak langsung dari keberhasilan AS mencapai kemandirian energi melalui produksi *shale oil*. Hal ini secara drastis mengurangi imperatif AS untuk mengimpor hidrokarbon dari Timur Tengah. Hal ini mengubah pola ketergantungan asimetris yang selama ini menjadi basis hubungan AS-Timur Tengah, sementara China justru mengisi posisi tersebut sebagai konsumen energi terbesar yang tak tergantikan bagi kawasan ini.

Pada tahun 2023, kesenjangan ini telah melebar menjadi hegemoni statistik yang tak terbantahkan, di mana China mencatatkan volume perdagangan sekitar \$460,5 miliar, atau hampir 3,5 kali lipat lebih besar dibandingkan AS yang hanya mencatat kisaran \$132,8 miliar. Disparitas angka yang ekstrem ini mencerminkan keberhasilan strategi negara-negara Teluk dalam melakukan *Strategic Hedging* atau politik "pagar betis". Sebagaimana dijelaskan oleh Jonathan Fulton (2021), para pemimpin di Timur Tengah merespons persepsi penarikan mundur AS (*US Retrenchment*) dengan mendiversifikasi aliansi mereka: mempertahankan AS sebagai penjamin keamanan, namun secara agresif merangkul China sebagai penopang utama ekonomi nasional. Dominasi China dalam grafik perdagangan barang ini juga divalidasi oleh C. Murphy (2022) yang berargumen bahwa melalui BRI China tidak hanya meningkatkan volume dagang tetapi juga menciptakan ketergantungan struktural melalui pembangunan infrastruktur fisik dan digital, sebuah instrumen ekonomi yang tidak lagi diprioritaskan oleh AS dalam diplomasi kawasannya. Dengan demikian, data 2023 menegaskan bahwa meskipun AS masih memegang supremasi militer sedangkan legitimasi kepemimpinan ekonomi di Timur Tengah telah sepenuhnya beralih ke China.

### **1.6 Kepentingan China di Timur Tengah dalam Perspektif Neorealisme**

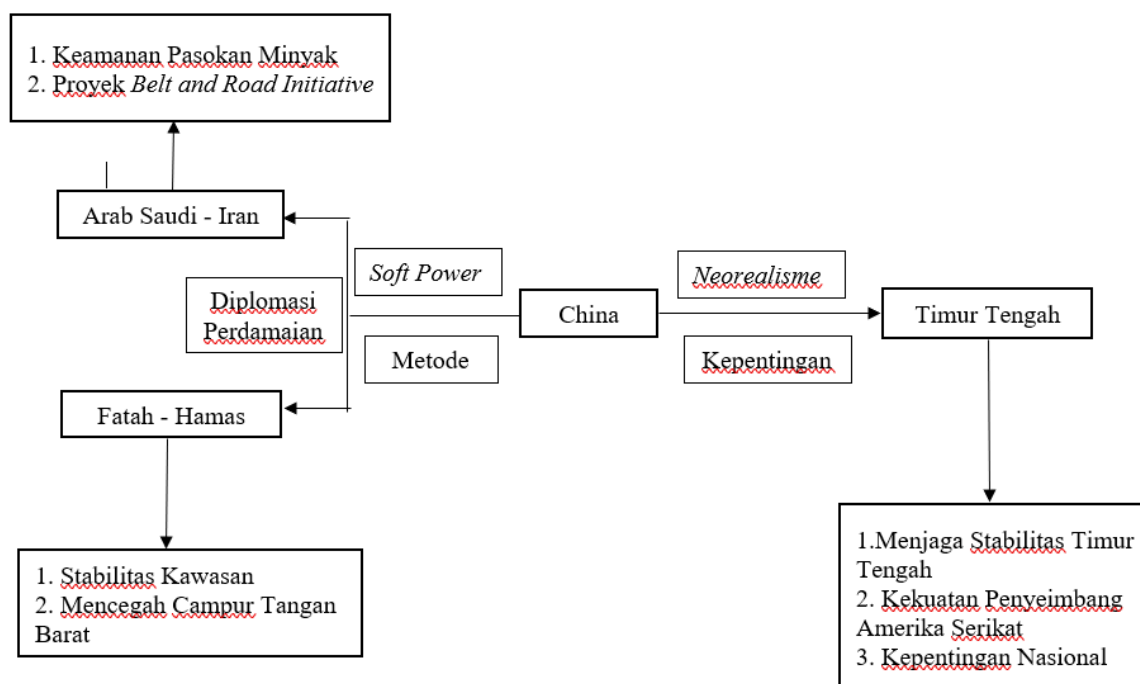
Dalam lanskap politik global yang anarkis, kepentingan China di Timur Tengah dapat dipahami melalui pendekatan Neorealisme, di mana negara

bertindak rasional untuk memaksimalkan keamanan dan pengaruhnya. Strategi China menunjukkan pergeseran paradigma yang unik: China menggunakan instrumen *Soft Power* berupa mediasi diplomatik dan citra netral – sebagai metode utama untuk mencapai tujuan "keras" (*hard objectives*), yaitu menyeimbangkan hegemoni AS di kawasan tersebut. Berbeda dengan pendekatan militeristik Barat, China memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan alternatif yang konstruktif. Upaya penyeimbangan ini (*counterbalancing*) diarahkan untuk menciptakan tatanan multipolar di mana China dapat mengamankan kepentingan nasionalnya tanpa memicu konfrontasi langsung dengan Washington, sebuah strategi yang oleh para sarjana disebut sebagai "penyeimbangan lunak" atau *soft balancing* (Sun dan Zoubir, 2018).

Pada dimensi ekonomi dan energi, keberhasilan mediasi antara Arab Saudi dan Iran difungsikan sebagai penopang vital bagi ketahanan domestik China. Sebagaimana tertera dalam skema, perdamaian di Teluk berkorelasi langsung dengan dua kepentingan material utama: jaminan keamanan pasokan minyak dan keberlangsungan proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Mengingat ketergantungan China yang masif terhadap impor energi hidrokarbon, stabilitas hubungan Arab Saudi-Iran adalah prasyarat mutlak untuk mencegah fluktuasi harga atau gangguan suplai. Lebih jauh, kawasan Teluk yang stabil berfungsi sebagai simpul logistik krusial bagi ambisi konektivitas global BRI, memastikan investasi infrastruktur China aman dari risiko konflik proksi yang sebelumnya marak terjadi.

Sementara itu, pada dimensi keamanan strategis, pendekatan China terhadap rekonsiliasi faksi Fatah dan Hamas memiliki orientasi defensif-geopolitik. Fokus utama dari mediasi ini adalah menciptakan stabilitas kawasan Palestina guna meminimalisir dalih bagi campur tangan kekuatan Barat. Dalam pandangan Neorealis, ketidakstabilan internal di negara lain sering kali menjadi pintu masuk bagi intervensi asing yang dapat mengancam keseimbangan regional. Dengan memfasilitasi persatuan nasional Palestina, China berupaya menutup celah intervensi tersebut, sekaligus memperkuat legitimasi moralnya di mata negara-negara *Global South*. Langkah ini secara efektif mengisolasi pengaruh diplomasi koersif Barat dan menegaskan posisi China sebagai aktor yang mampu menghadirkan solusi damai yang substantif (Lons, 2024). Berikut merupakan ilustrasi mengenai kepentingan China di Timur Tengah

Gambar 1.3 Kepentingan China di Kawasan Timur Tengah



Gambar 1.3 mengilustrasikan logika strategis China di Timur Tengah yang berlandaskan pada perspektif Neorealisme, di mana China diposisikan sebagai aktor rasional yang berupaya memaksimalkan kepentingannya melalui kalkulasi kekuasaan. Secara operasional, diagram menunjukkan bahwa China tidak menggunakan pendekatan militer konvensional, melainkan mengadopsi instrumen *Soft Power* yang diimplementasikan melalui peran mediasi aktif dalam dua konflik poros utama: rekonsiliasi Arab Saudi-Iran dan unifikasi faksi Fatah-Hamas.

Alur kausalitas dalam bagan ini menegaskan bahwa langkah diplomasi tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kepentingan material yang vital; stabilitas antara Arab Saudi dan Iran secara langsung dikaitkan dengan jaminan 'Keamanan Pasokan Minyak' dan keberlanjutan proyek BRI, sebuah imperatif yang sangat krusial mengingat volume impor energi China yang masif. Di sisi lain, keterlibatan dalam isu Palestina (Fatah-Hamas) ditarik garis lurus menuju upaya 'Mencegah Campur Tangan Barat' serta menjaga stabilitas kawasan. Muara dari seluruh manuver strategis ini, sebagaimana digambarkan pada kotak tujuan akhir, adalah terciptanya stabilitas regional yang kondusif bagi ekspansi ekonomi, sekaligus mengukuhkan posisi China sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing power*) yang efektif terhadap hegemoni AS di Timur Tengah.

## Penutup

Transformasi peran China di Timur Tengah dari sekadar mitra dagang pasif menjadi mediator keamanan proaktif merupakan manifestasi strategis dari prinsip Neorealisme. China bertindak rasional untuk memaksimalkan peluang bertahan

hidup dan memperluas pengaruh dalam sistem internasional yang anarkis. Berdasarkan analisis data perdagangan (2010–2023) dan studi kasus mediasi, penelitian ini menyimpulkan empat poin utama:

1. Divergensi Ekonomi sebagai Daya Tawar Politik. Terjadi *The Great Divergence* antara kekuatan ekonomi China dan AS. Dengan volume perdagangan mencapai US\$ 460,5 miliar pada 2023 (hampir 3,5 kali lipat lebih besar dari AS), China menciptakan "interdependensi yang dipersenjatai" (*weaponized interdependence*). Dominasi ini memberikan Beijing *leverage* politik yang tidak lagi dimiliki Washington untuk menekan rival regional seperti Arab Saudi dan Iran agar duduk di meja perundingan.
2. Variasi Efektivitas *Soft Power*. Diplomasi China memiliki tingkat efektivitas yang bervariasi. Pendekatan ini sangat efektif dalam konflik antarnegara (*inter-state*) seperti Arab Saudi-Iran karena China memegang kendali sebagai konsumen minyak utama. Sebaliknya, dalam konflik aktor non-negara (*intra-state*) seperti Fatah-Hamas, peran China cenderung simbolik. Di sini, diplomasi berfungsi sebagai instrumen pencitraan untuk menantang legitimasi moral Barat dan memposisikan diri sebagai pelindung *Global South*, bukan sekadar pemberi solusi teknis.
3. Imperatif Keamanan Energi dan BRI. Aktivisme diplomatik China didorong oleh kalkulasi keamanan nasional, bukan altruisme. Mengingat 96% impor dari kawasan ini adalah produk energi, stabilitas Teluk adalah prasyarat mutlak. Diplomasi perdamaian ini sejatinya adalah mekanisme pertahanan diri untuk mengamankan pasokan energi domestik dan menjamin kelancaran logistik *Belt and Road Initiative* (BRI) dari risiko konflik proksi.
4. Strategi *Soft Balancing* terhadap Hegemoni AS. China menerapkan *soft balancing* untuk membentuk tatanan multipolar tanpa konfrontasi militer. Melalui "Diplomasi Perdamaian" dan prinsip non-intervensi, China menggerus pengaruh AS secara bertahap. Beijing menawarkan alternatif mediasi yang netral, mengurangi efektivitas hegemoni politik AS tanpa perlu menggelar pangkalan militer yang provokatif.

Kebangkitan China sebagai mediator keamanan memvalidasi efektivitas strategi *hedging*. Kehadiran China memungkinkan aktor regional seperti Arab Saudi dan UEA untuk mendiversifikasi kemitraan strategis mereka – mengandalkan AS untuk jaminan keamanan militer, sementara mempererat hubungan ekonomi dan diplomasi dengan China. Dualitas ini memberikan ruang manuver yang lebih besar bagi negara-negara kawasan untuk menegaskan otonomi strategis mereka dan menghindari jebakan keberpihakan total pada satu kekuatan besar.

## Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam penelitian ini, agenda riset akademik mendatang disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan menyoroti perspektif *agency* negara-negara Timur Tengah, alih-alih hanya memandang mereka sebagai objek pasif dari diplomasi kekuatan besar. Studi selanjutnya perlu mengeksplorasi bagaimana aktor regional secara aktif mendayagunakan rivalitas China-AS melalui strategi *hedging* untuk memaksimalkan keuntungan domestik. Selain itu, diperlukan kajian longitudinal untuk menguji ketahanan model *Developmental Peace* China; khususnya untuk menjawab apakah perdamaian yang dibangun di atas insentif ekonomi semata mampu bertahan menghadapi eskalasi militer tanpa adanya jaminan keamanan fisik. Penelitian komparatif yang menyandingkan mediasi China di Teluk dengan keterlibatannya di konflik lain, seperti krisis Rusia-Ukraina atau Afrika, juga krusial dilakukan guna memverifikasi konsistensi pola diplomasi Beijing secara global.

Dari sisi implikasi praktis, dinamika yang terungkap dalam studi ini merekomendasikan perlunya diversifikasi mitra mediasi bagi negara-negara di kawasan konflik. Model *multi-alignment* seperti yang diterapkan Arab Saudi dengan memisahkan ketergantungan keamanan pada Barat dan ekonomi pada China terbukti efektif sebagai strategi navigasi di tengah tatanan dunia multipolar. Khusus bagi China, jika ingin meningkatkan efektivitas resolusi konflik pada level internal aktor non-negara (seperti kasus Fatah-Hamas), disarankan untuk bergerak melampaui deklarasi normatif menuju pelebagaan mekanisme pengawas yang konkret. Tanpa pengembangan instrumen diplomatik yang lebih mengikat di lapangan, pengaruh China dalam konflik intra-negara berisiko tetap terbatas pada ranah simbolik semata.

### Daftar Pustaka

- Al Tamimi, J. (2017, October 16). *China uses soft power to woo Arab world*. *Gulf News*.  
<https://gulfnews.com/world/mena/china-uses-soft-power-to-woo-arab-world-1.2105970>
- Arab Center for Research and Policy Studies. (2023). *China's mediation between Saudi Arabia and Iran: Implications for regional and global politics*.  
<https://www.dohainstitute.org/en/ResearchAndStudies/Pages/default.aspx>
- Brenner, B. (2017). *Gaza under Hamas: From Islamic democracy to Islamist governance*. I.B. Tauris.
- Burton, G. (2019). *China and Middle East conflicts: Responding to war and rivalry from the Cold War to the present*. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9780429453281>
- Calabrese, J. (2019). *Intersections: China and the Middle East*. Middle East Institute.

- Chowdhury, D. R. (2018, June 17). *China a pillar of strength in Qatar's fightback against Arab blockade*. South China Morning Post. <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/2149915/china-pillar-strength-qatars-fightback-against-arab-blockade>
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Ehteshami, A., & Horesh, N. (Eds.). (2018). *China's presence in the Middle East: The implications of the One Belt, One Road Initiative*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315183669>
- Elass, J. (2021, September 9). *Saudi Aramco aims to surpass Russia as China's largest oil supplier*. The Arab Weekly. <https://thearabweekly.com/saudi-aramco-aims-surpass-russia-chinas-largest-oil-supplier>
- Elgindy, K. (2022). *The Algiers Declaration and the elusive quest for Palestinian unity*. Middle East Institute. <https://ejil.org/pdfs/1/1/1136.pdf>
- Fassihi, F., & Myers, S. L. (2021, March 27). *China, with \$400 billion deal, deepens influence in Mideast*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/middleeast/china-iran-deal.html>
- Fulton, J. (2020). *China-Saudi Arabia relations through the '1+2+3' cooperation pattern*. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 14(4), 516–527. <https://doi.org/10.1080/25765949.2020.1841991>
- Fulton, J. (2021). *China's relations with the Gulf monarchies*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003019555>
- Fulton, J. (2023). *China's mediation between Saudi Arabia and Iran: The dawn of a new era?* *Middle East Policy*, 30(3), 3–14. <https://doi.org/10.1111/mepo.12716>
- Fulton, J. (2024). *China's Gulf diplomacy and the Saudi-Iran deal*. Middle East Policy Council. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/present-without-impact-how-the-middle-east-perceives-chinas-diplomatic-engagement/>
- Fulton, J., Sim, L. C., & Tanchum, M. (2019). *China's growing role in the Middle East*. The Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/chinas-growing-role-in-the-middle-east>
- Grant, C., & Kieff, A. (2021). *China's Belt and Road Initiative and global trade routes*. *International Affairs*, 97(2), 255–272. <https://doi.org/10.1093/ia/iab008>
- Gunning, J. (2007). *Hamas in politics: Democracy, religion, violence*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/gunn14626>
- Guzansky, Y., & Lavi, G. (2020). *Saudi Arabia-China relations: A brave friendship or useful leverage?* *Strategic Assessment*, 23(2), 109–114.

<https://strategicassessment.inss.org.il/en/articles/saudi-arabia-china-relations-a-brave-friendship-or-useful-leverage/>

- Houghton, B. (2022). China's balancing strategy between Saudi Arabia and Iran: The view from Riyadh. *Asian Affairs*, 53(1), 124–144.
- Karimah, A. (2017). *Kebijakan Indonesia dalam menengahi konflik Arab Saudi-Iran dalam kasus eksekusi mati Nimr Al-Nimr* [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. UMY Repository. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16474>
- Kompas. (2023, March 11). *Kisah peran China di balik rekonsiliasi Arab Saudi-Iran*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/kisah-peran-china-di-balik-rekonsiliasi-arab-saudi-iran>
- Krippendorff, K. (2004). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412973050>
- Laarid, M. (2022). China's strategic interests in the Middle East. *Journal of Asian and African Studies*, 57(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/00219096211042469>
- Lons, C. (2024). China's Palestinian unity deal: Strategic depth or diplomatic theatre? *IISS Strategic Comments*, 30(4). <https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2024/chinas-palestinian-unity-deal-strategic-depth-or-diplomatic-theatre/>
- Lons, C., Fulton, J., Sun, D., & Al-Tamimi, N. (2019). *China's great game in the Middle East* (Policy Brief). European Council on Foreign Relations. [https://ecfr.eu/publication/china\\_great\\_game\\_middle\\_east/](https://ecfr.eu/publication/china_great_game_middle_east/)
- Meidan, M. (2015). *A changing outlook for Chinese energy security* (DIIS Policy Brief). Danish Institute for International Studies.
- Milton-Edwards, B. (2008). The Hamas-Fatah conflict: An analysis. *Conflict, Security & Development*, 8(4), 481–498. <https://doi.org/10.1080/14678800802539366>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2023, March 10). *Joint trilateral statement by the People's Republic of China, the Kingdom of Saudi Arabia, and the Islamic Republic of Iran*. [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/202303/t20230311\\_11039241.html](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202303/t20230311_11039241.html)
- Murphy, D. C. (2022). *China's rise in the Global South: The Middle East, Africa, and Beijing's alternative world order*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9781503630093>
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.
- The Observatory of Economic Complexity. (n.d.). *China (CHN) exports, imports, and trade partners*. Retrieved February 11, 2026, from <https://oec.world/en/profile/country/chn>
- Sameer, A. (2023). China's mediation in the Saudi-Iran rapprochement. *Middle East Policy*, 30(2), 1–10. <https://doi.org/10.1111/mepo.12684>

- Sun, D., & Zoubir, Y. H. (2018). China's participation in conflict resolution in the Middle East and North Africa: A case of quasi-mediation diplomacy? *Journal of Contemporary China*, 27(113), 224–243. <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1389019>
- Swaine, M. D. (2012). Chinese views of the Syrian conflict. *China Leadership Monitor*, 39, 1–13.
- Torres, M. (2023). The Saudi–Iran deal and China’s diplomatic rise. *Foreign Policy Analysis*, 19(3), 1–15. <https://doi.org/10.1093/fpa/orad018>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.
- Xue, L. (2019). *China’s diplomacy in the Middle East: From the Belt and Road Initiative to responsible protection*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-0450-4>
- Yetiv, S. A. (2017). *The United States, China, and the Middle East in the twenty-first century*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108277902>
- Yulianti, D., & Affandi, R. M. T. N. (2018). Strategi soft power dalam ekspansi ekonomi China di Timur Tengah: Studi kasus kerjasama China-Iran. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(2), 247–265. <http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/mandala/article/view/466>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zhou, J. (2018, July 11). *China pledges \$23 billion in loans, aid to Arab states*. China Daily. <https://www.chinadaily.com.cn/a/201807/11/WS5b45450ca3103349141e1f7d.htm>
- Zreik, M. (2024). China’s economic and political presence in the Middle East and South Asia. *British Journal of Middle Eastern Studies*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/13530194.2024.2367797>